

# Konsep Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Sosial: Kesenjangan Teoretis dan Praktis di Indonesia

Wahyudi Kumorotomo  
Gurubesar Jurusan Manajemen & Kebijakan Publik  
Universitas Gadjah Mada

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)  
kumoro@ugm.ac.id

Diskusi Kelompok Terarah Litbang KPK

29 Agustus 2012

# Filosofi Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Pasal 33 UUD 1945:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
  2. Cabang-cabang produksi yg penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
  3. Bumi, air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
  4. Perekonomian disusun berdasar demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingk, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Tambahan dari amandemen th 2002).
- Bgm kita bisa mengambil semua nilai positif dr kapitalisme dan sosialisme? (Pancasila ---- The Third Way dari Giddens?)

# Social Policy di Negara Kesejahteraan

- Social Security
- Health
- Education
- Housing & environment
- Personal social services.

# Structure of Budget (UK, 2004)

	£ Billion	% Total Spending	% GDP
<b>Social spending</b>			
Social security	138	28	12
Health	81	17	7
Education	63	13	5
Housing & environment	17	3	1
Personal social services	22	5	2
<b>Other spending</b>			
Defense	27	6	2
Law & order	29	6	2
Industry, agriculture & employment	20	4	2
Transport	16	3	1
Others (sport, culture, int'l devt)	49	10	4
Debt interest	25	5	2
<b>Total public spending</b>	<b>488</b>	<b>100</b>	<b>41</b>

# Indonesia Negeri Auto-Pilot, Peran Pemerintah Turun: Apa Buktinya? Mengapa?



[www.chappyhakim.com](http://www.chappyhakim.com)

1. Peran APBN dalam peningkatan kemakmuran (pertumbuhan PDB) hanya 8,9% (Radhi, 2012)
2. Kebocoran & korupsi anggaran terjadi di kedua sisi: pendapatan (*revenues*) dan belanja (*expenditure*).
3. Mekanisme APBN dan APBD tidak sinkron.
4. Sebagian besar anggaran publik tersedot untuk biaya operasional birokrasi (gaji, pengeluaran rutin).
5. Prioritas pembangunan belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
6. Daya serap anggaran turun, sisa anggaran tidak dapat dipergunakan, akuntabilitas anggaran rendah.

# Kebijakan Sosial di Indonesia, 2007

	Indonesia	Rerata Asia Tenggara
<b>Belanja Pendidikan:</b>		
% thd PDB	3,5	2,7
% thd Belanja Pemerintah	17,5	16,1
<b>Rasio guru-murid:</b>		
SD	18,8	19,3
Sekolah Lanjutan	13,0	17,8
<b>Net enrollment rate:</b>		
SD	94,8	93,1
Sekolah Lanjutan	69,7	
Pendidikan tinggi	18,0	22,5
<b>Tingkat melek huruf:</b>		
Laki-laki	95,2	96,0
Perempuan	88,8	90,1
<b>Belanja Kesehatan:</b>		
% thd PDB	2,2	4,1
Swasta	1,0	2,2
Pemerintah	1,2	1,9
Per kapita (USD)	41,8	96,2
Sanitasi (% penduduk dg akses)	52,0	65,6
Air bersih (% penduduk dg akses)	80,0	87,4
Kurang gizi	19,6	11,9
<b>Tingkat harapan hidup:</b>		
Laki-laki	68,8	79,4
Perempuan	72,8	74,0

## Definisi Bantuan Sosial (UU 11/2009)

1. Diberikan pd seseorang, kelompok, dan/atau masy
2. Terjadi “guncangan & kerentanan sosial”
3. Bantuan: langsung, penyediaan akses, dan penguatan kelembagaan
4. Dapat bersifat sementara maupun berkelanjutan
5. Bentuk: makanan pokok, pakaian, tempat-tinggal, dana tunai, perawatan kshtn & obat, akses layanan dasar, bimbingan teknis.

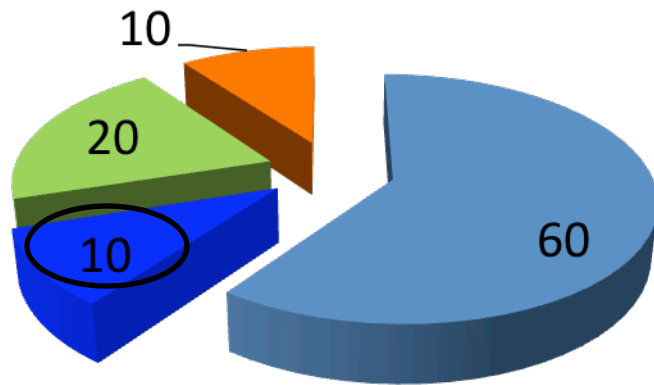
# Pola Umum Penyimpangan Bansos di Pusat

1. Tupoksi utama Mensos, tapi ternyata tersebar merata di Kementerian yg lain → peruntukan tidak jelas.
2. Bansos menjadi alat politik; Komisi IV DPR minta jatah 50% (Rp 4,33 T) dari Kemtan, untuk “aspirasi daerah”.
3. Tupoksi, bukan krn kerentanan; 1) Kemtan: BLBU (Bantuan Langsung Benih Unggul) mestinya Tupoksi, bukan Bansos; 2) Bantuan beasiswa di Kemenag.
4. Kurang tepat sasaran; Kemdiknas: SMP 21 Semarang, rasio kelas, kondisi sekolah tidak perlu Bansos; Pendanaan rehabilitasi ruang sekolah tidak memenuhi kriteria Bansos; Tunjangan profesi guru semestinya tidak boleh dari Bansos.
5. Pencairan terlambat, pendanaan kurang efektif: Pembangunan RKB dalam tahun anggaran baru diterima bulan Nov 2011.



# Desentralisasi: Dari APBN ke APBD (?)

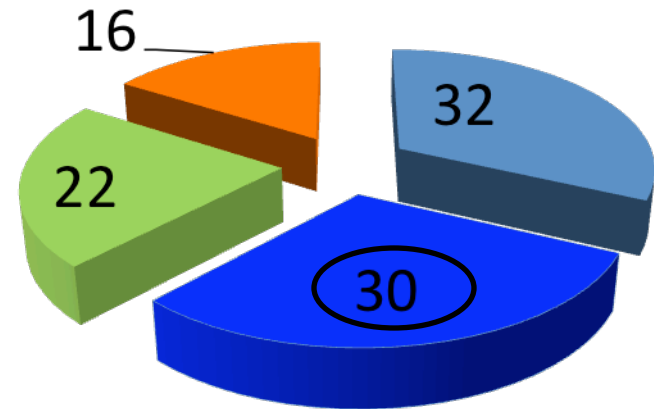
Desentralisasi Fiskal telah mengalihkan sebagian sumber dana publik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Apakah ini sudah efektif?



■ Central Gov ■ Local Gov ■ Subsidy ■ Interest Payment

2000

2010



■ Central Gov ■ Local Gov ■ Subsidy ■ Interest Payment

# Belanja Provinsi thd Pengeluaran Non- Makanan Rumah- Tangga (2008)

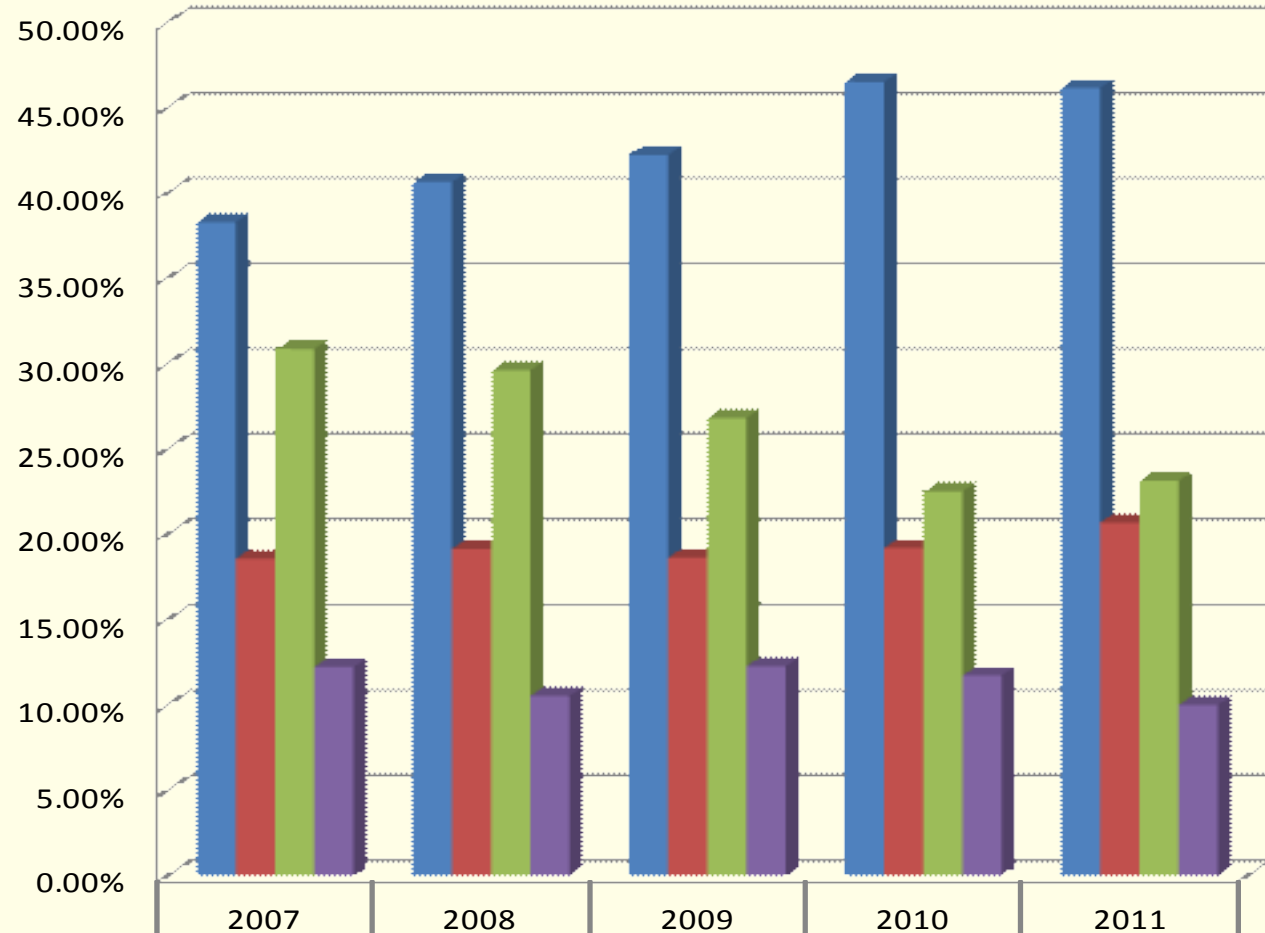
Provinsi	Pendidikan	Kesehatan
Aceh	4,63	7,29
Sumatra Utara	7,25	7,38
Sumatra Barat	7,14	6,46
Riau	5,85	5,78
Jambi	5,13	6,47
Sumatra Selatan	6,25	6,88
Bengkulu	7,30	7,35
Lampung	6,06	5,35
Bangka-Belitung	4,55	5,01
Kepulauan Riau	4,35	5,84
DKI Jakarta	6,95	7,12
Jawa Barat	7,93	6,76
Jawa Tengah	8,68	6,58
DI Yogyakarta	10,55	7,62
Jawa Timur	9,10	6,48
Banten	7,63	7,62
Bali	4,81	7,68
Nusatenggara Barat	7,35	6,78
Nusatenggara Timur	4,64	6,26
Kalimantan Barat	7,42	7,18
Kalimantan Tengah	3,60	4,49
Kalimantan Selatan	4,50	5,89
Kalimantan Timur	6,04	4,91
Sulawesi Utara	4,73	7,14
Sulawesi Tengah	4,65	6,30
Sulawesi Selatan	5,68	5,33
Sulawesi Tenggara	6,21	5,30
Gorontalo	7,69	8,24
Sulawesi Barat	4,90	5,44
Maluku	5,77	4,47
Maluku Utara	5,88	5,22
Papua Barat	3,29	3,93

Sumber:  
Susenas, 2009

# Komposisi Belanja Daerah

Note: data APBD konsolidasi secara nasional

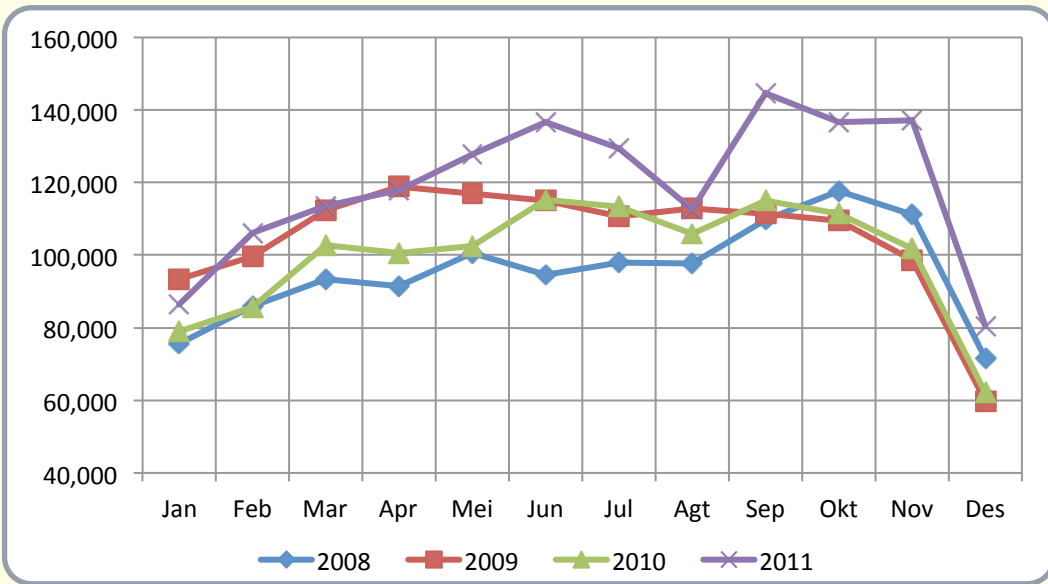
- Belanja modal mengalami trend menurun selama 2007-2011. Pada tahun 2011, porsi belanja modal terhadap total belanja hanya mencapai 20,7%.
- NB: Pada masa Orba, rerata belanja modal lebih dari 40%.



■ Belanja Pegawai	38.29%	40.65%	42.25%	46.52%	46.16%
■ Belanja Barang dan jasa	18.58%	19.16%	18.64%	19.21%	20.69%
■ Belanja Modal	30.87%	29.63%	26.83%	22.53%	23.14%
■ Belanja Lainnya	12.25%	10.55%	12.29%	11.74%	10.01%

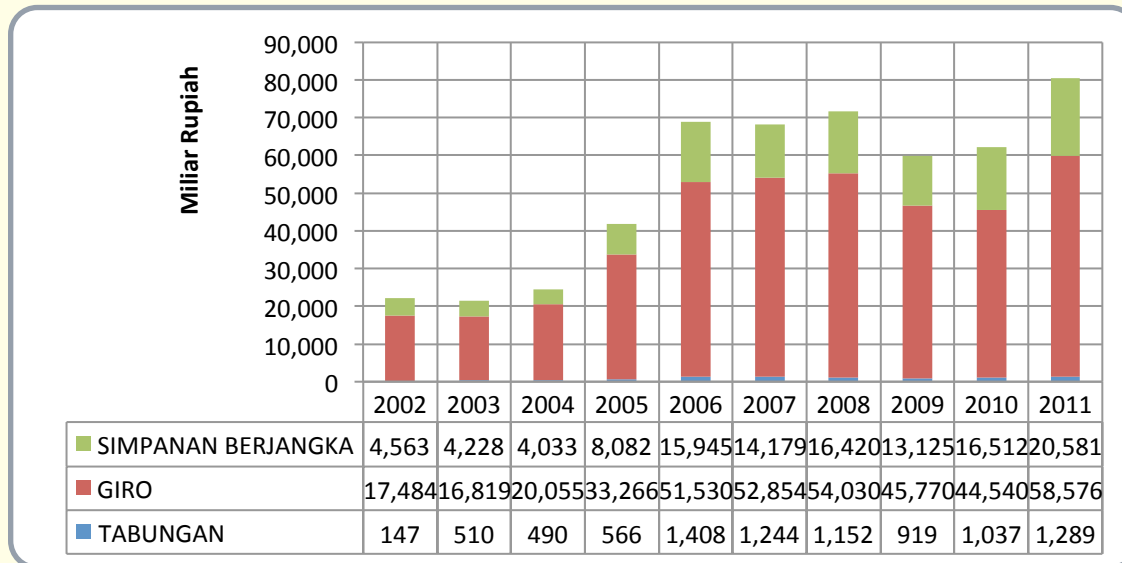
# DANA *IDLE* PEMDA DI PERBANKAN

dalam miliar Rupiah



- Trend dana pemda di perbankan perbulannya mengalami fluktuasi dan mempunyai trend yang hampir sama pada setiap tahunnya.
- Terjadi peningkatan sampai dengan bulan juni lalu mulai menurun sampai dengan bulan agustus → disebabkan mulai dilakukannya pembayaran oleh pemda
- Posisi pada akhir Desember menunjukkan perkiraan jumlah dana Pemda yang *idle* di bank umum (Th 2011 mencapai Rp 80,4 triliun)

- Bentuk dana pemda di Perbankan terdiri dr simpanan berjangka, Giro dan Tabungan.
- Giro lebih banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari Pemda (bagian terbesar dana Pemda di Bank)
- Dana dalam bentuk simpanan berjangka mengalami tren yg meningkat secara signifikan



# Pola Belanja Daerah: APBD Kabupaten Karanganyar 2012

Uraian		Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
<b>Total Pendapatan</b>		1,092,509	93.42
	Pendapatan Asli Daerah	89,499	7.65
	Dana Perimbangan	806,458	68.96
	Pajak Daerah	29,075	2.49
	Retribusi Daerah	13,863	1.19
	Lain-lain Pendapatan	37,324	3.19
<b>Total Belanja</b>		1,169,470	<b>100.00</b>
Belanja Tidak Langsung		924,570	79.06
	Belanja pegawai	783,235	66.97
	Hibah	8,366	0.72
	Bantuan sosial	87,373	7.47
	Bantuan keuangan	40,253	3.44
	Belanja tidak terduga	2,500	0.21
Belanja Langsung		244,899	20.94
	Belanja pegawai	36,845	3.15
	Belanja barang & jasa	102,149	8.73
	Belanja modal	105,905	9.06
Pembiayaan Daerah		76,960	6.58
	SiLPA	79,973	6.84
	Pengeluaran	3,013	0.26
<b>Defisit</b>		(76,960)	-6.58

# Daerah dengan Belanja Pegawai Sangat Besar Tahun 2010

1. Kota Tasikmalaya: 70%
2. Kab Klaten: 70%
3. Kota Bitung: 70%
4. Kota Padangsidempuan: 70%
5. Kab Sragen: 70%
6. Kab Purworejo: 70%
7. Kab Pemalang: 70%
8. Kab Kulonprogo: 71%

9. Kab Bantul: 71%
10. Kab Kuningan: 71%
11. Kota Palu: 71%
12. Kab Simalungun: 72%
13. Kab Agam: 72%
14. Kota Ambon: 73%
- 15. Kab Karanganyar: 75%**
16. Kab Lumajang: 83%

Sumber: DJPK Kemkeu, 2011 Fitra, 2011.

# Tantangan Belanja Tidak Langsung

1. Kenaikan gaji PNS 10%
2. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
3. Kenaikan TPAPD menjadi sebesar upah minimum Provinsi Jawa Tengah
4. Kenaikan Alokasi Dana Desa

# Penyimpangan Bansos di Daerah

1. Kriteria alokasi tidak jelas (Acuan bukan lagi UU 11/2009 dan Bultek 10/2011, tetapi benar-benar tergantung diskresi Kepala Daerah).
2. Peruntukan kurang tepat, terlalu banyak muatan politis (Bansos untuk LSM, sarana ibadah, dsb).
3. Bansos hanya untuk pencitraan daerah (misal: untuk Persatuan Sepakbola, asosiasi pemuda); penilaian ttg manfaat jarang dilakukan.
4. Batasan ttg proporsi sangat kabur; ada daerah yg mengalokasikan hingga lebih 20%, tetapi ada yg tidak sama sekali.
5. Bansos menjadi Dana Taktis Bupati, akuntabilitas rendah. (Mis: di Sleman, 85% dana Bansos dialokasikan pada 2 minggu menjelang Pilkada).



# Agenda yg Banyak Diabaikan Pemda

1. Penajaman prioritas belanja modal pada APBD → pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).
2. Meningkatkan daya-serap anggaran untuk kepentingan pelayanan dasar.
3. Mendorong perumusan program yg langsung bermanfaat bagi rakyat (subsidi, pemberdayaan, peningkatan kemampuan wirausaha, dsb).
4. Meningkatkan kinerja SKPD di sektor-sektor pelayanan publik.
5. Mengefektifkan dana Bansos dan menjaga akuntabilitasnya bagi publik.

**TERIMA KASIH**